

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA

ITANG

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail: itangfauzihassim@gmail.com
Hp.081905537995/18128854761

Abstrak

Tulisan ini mengkaji kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kenaikan harga. Beberapa hal terkait kebijakan tersebut adalah diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dalam bentuk program kompensasi (compensatory program) yang sifatnya khusus (crash program) atau program jaring pengaman sosial (social safety net Program). Program tersebut melalui penambahan nilai bantuan dan coverage program rutin yang sudah ada atau yang dikenal saat ini sebagai Percepatan dan Perluasan Program Perlindungan Sosial (P4S), antara lain: Bantuan Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Harapan dengan adanya program BLSM ini, maka Rumah Tangga Sasaran diharapkan masih konsisten untuk melakukan fungsi sosialnya sehingga kondisi kenaikan kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga tidak menjadikannya berpengaruh signifikan dan tetap masyarakat dapat hidup sejahtera. BLSM diluncurkan oleh pemerintah mulai 22 Juni 2013 dan diberikan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan besaran Rp150.000,- per bulan selama empat bulan. Tahap awal BLSM diberikan dua bulan sekaligus, yaitu Rp 300.000,- di mana akan dibagikan bertahap sampai Juli. Pembagiannya fokus pada dua tempat, yaitu PT. Pos Indonesia yang telah ditunjuk dan komunitas masyarakat melalui perangkat pemerintahan. Penyaluran ini didahului dengan mencetak Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai bukti pengambilan dana BLSM dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia. Untuk mendanai BLSM tersebut, alokasi anggarannya mencapai Rp 9,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013.

Kata Kunci: *kebijakan, pemerintah, kenaikan harga/inflasi*

A. Pendahuluan

Kenaikan harga merupakan naiknya harga barang di pasar atau melonjaknya harga barang di pasar. Kenaikan harga atau sering dikenal dengan inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus.¹ Jika tingkat harga berfluktuasi, bulan ini naik dan bulan depan turun, setiap adanya kenaikan kerja tidak berarti sebagai inflasi.² Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang.³

Dampak kenaikan harga secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Meningkatnya harga barang kebutuhan pokok sebagai salah satu akibat langsung dari kenaikan harga dasar barang, akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar. Kenaikan harga ini disebabkan beberapa faktor, akibat ulah spekulasi, minimnya barang di pasaran, kondisi masyarakat yang tidak stabil, kondisi alam yang rusak, politik dan kebijakan pemerintah itu sendiri. Beberapa faktor penyebab kenaikan harga ini tentunya pemerintah berupaya untuk dapat menstabilkan kondisi harga tersebut. Dalam tulisan ini ingin mengkaji kebijakan apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kenaikan harga.

B. Macam Macam Kenaikan Harga

Macam macam kenaikan harga atau inflasi dapat digolongkan, yaitu penggolongan pertama didasarkan pada parah atau tidaknya inflasi tersebut. Sukirno membedakan beberapa macam inflasi yaitu:⁴

1. Inflasi Merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun)
2. Inflasi Sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen per tahun)
3. Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo satu tahun).

Sedangkan menurut Nanga dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dapat dipilah dalam tiga kategori:⁵

1. Inflasi sedang (moderate inflation), yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat, dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif.
2. Inflasi ganas (galloping inflation), yaitu inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit seperti 20, 100 atau 200 persen pertahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam perekonomian.
3. Hyperinflasi (Hyperinflation), yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ribuan bahkan milyar persen pertahun, merupakan jenis yang mematikan.

Macam macam Inflasi, yaitu:

1. Berdasarkan tingkat kualitas parah atau tidaknya

Ada beberapa inflasi berdasarkan tingkat kualitas parah atau tidaknya yaitu:

- a. Inflasi ringan, yaitu: Inflasi ringan atau inflasi merangkak (creeping inflation) adalah inflasi yang lajunya kurang dari 10% per tahun, inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan.
- b. Inflasi sedang, yaitu: Inflasi ini memiliki ciri yaitu lajunya berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Tingkat sedang ini sudah mulai membahayakan kegiatan ekonomi. Perlu diingat laju inflasi ini secara nyata dapat dilihat garak kenaikan harga. Pendapatan riil masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti buruh, mulai turun dan kenaikan upah selalu lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan harga.
- c. Inflasi berat, yaitu: Inflasi berat adalah inflasi yang lajunya antara 30% sampai 100%. Kenaikan harga sudah sulit dikendalikan. Hal ini diperburuk lagi oleh pelaku-palaku ekonomi yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan spekulasi.
- d. Inflasi liar (hyperinflation), yaitu: Inflasi liar adalah inflasi yang lajunya sudah melebihi dari 100% per tahun. Inflasi ini terjadi bila setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hyperinflation).

2. Inflasi Berdasarkan Penyebabnya

- a. Inflasi karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan (*demand full inflation*), yaitu: Inflasi ini merupakan inflasi yang disebabkan oleh besarnya permintaan masyarakat akan barang-barang. Permintaan total yang berlebihan biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.
- b. Inflasi karena kenaikan biaya-biaya produksi (*cost push inflation*), yaitu: Inflasi ini terjadi karena adanya perubahan tingkat penawaran. Kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll.), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll. sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana

dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Jenis inflasi ini dibedakan menjadi dua :

- a) Inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga (price push inflation) karena kenaikan harga bahan-bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya OPEC menaikkan harga minyak;
- b) Inflasi yang disebabkan karena kenaikan upah (wages cosh inflation) misalnya karena kenaikan gaji pegawai negeri yang diikuti usaha-usaha swasta pula, maka harga-harga barang lain juga ikut naik. Biasanya inflasi karena kenaikan upah atau gaji sangat ditakuti karena akan bias menimbulkan inflasi secara berkelanjutan. Karena upah naik, harga-harga akan naik. Karena harga barang naik, maka upah harus dinaikkan dan ini kemungkinan akan terus berkelanjutan.

3. Inflasi Berdasarkan Asalnya Inflasi dari segi asalnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Inflasi yang berasal dalam negeri seperti defisit anggaran belanja Negara yang terus menerus.
- b. Dalam keadaan seperti ini biasanya pemerintah mengintruksikan Bank Indonesia mencetak uang baru dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Selain itu inflasi dari dalam negeri juga dapat disebabkan oleh adanya gagal panen dan sebagainya.
- c. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). Inflasi ini timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang-barang impor. Inflasi seperti ini biasanya banyak dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang yang notabene sebagian besar usaha produksinya mempergunakan bahan dan alat dari luar negeri yang timbul karena adanya perdagangan internasional.

Jenis inflasi dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya, yaitu:⁶

1. Inflasi tarikan permintaan Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar

atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.

2. Inflasi dorongan biaya Inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

Inflasi struktural Inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

B. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Naik Turunnya Harga

Faktor faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga atau inflasi. Menurut Endang Puspitawati, dkk.⁷ ada beberapa teori yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya inflasi. Masing-masing teori melihat aspek-aspek tertentu dalam proses inflasi. Pandangan beberapa teori tentang sebab terjadinya inflasi antara lain sebagai berikut.

1. Teori Kuantitas

Pernyataan sederhana dari teori ini adalah kenaikan harga akan terjadi apabila kuantitas (jumlah) uang yang beredar bertambah. Menurut teori ini harga-harga adalah proporsi langsung dari jumlah uang, atau ditulis sebagai berikut. Menurut teori kuantitas ada dua penyebab terjadinya inflasi yaitu:

- a. Jumlah uang yang beredar melebihi yang dibutuhkan masyarakat. Maksudnya, jika jumlah uang yang beredar di masyarakat berlebihan, merupakan faktor utama pendorong terjadinya inflasi. Jumlah uang yang beredar terlalu banyak diantaranya karena terjadi defisit anggaran dan ditutup dengan mencetak uang. Semakin besar deficit yang dibiayai dari mencetak uang inflasi akan semakin parah.
- b. Harapan psikologis akan terjadinya kenaikan harga di masa yang akan datang akan memperparah terjadinya inflasi. Maksudnya, apabila masyarakat mengharapkan dan memperkirakan bahwa harga dimasa mendatang akan mengalami kenaikan, maka masyarakat akan membelanjakan uangnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian dala memegang uang. Keadaan ini akan semakin parah bila masyarakat sudah menyakini kenaikan harga makin besar dari waktu ke

waktu hingga masyarakat akan membelanjakan uangnya melebihi uang beredar. Hal ini dapat berakibat terjadinya hiperinflasi.

2. Teori Keynes

Para ahli ekonomi Keynesian (pengikut Keynes) menjelaskan seluruh proses ekonomi tanpa mementingkan peranan uang. Yang penting dalam kehidupan ekonomi nasional adalah produksi (penawaran) dan pembelanjaan (permintaan) dalam lingkaran ekonomi, sedangkan jumlah uang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat oleh dunia perbankan.

Dalam pandangan Keynes, permintaan masyarakat (*effective demand*) lah yang paling menentukan kestabilan kehidupan ekonomi nasional. Para konsumen, para produsen, pemerintah dan luar negeri bersama-sama membeli banyak barang dari yang dihasilkan oleh kapasitas produksi yang ada. Hal ini menyebabkan ketegangan-ketegangan di pasaran. Produksi tidak bisa dinaikkan karena dibatasi kapasitas produksi. Rendahnya jumlah barang/jasa yang diproduksi berakibat terhadap harga. Tentu harga-harga dari komoditi barang/jasa akan naik, hal ini akan berimplikasi pada munculnya masalah inflasi.

3. Teori Strukturalis

Menurut teori ini, ada dua hal penting dalam perekonomian Negara-negara yang sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketidakelastisan Penerimaan Ekspor. Nilai ekspor tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sector-sector lain. Adapun penyebab kelambanan tersebut sebagai berikut:
 - a) Di pasar dunia, harga barang-barang ekspor dari Negara tersebut semakin memburuk.
 - b) Produksi barang-barang ekspor tidak responsive terhadap kenaikan harga.
- b. Ketidak Elastisan Penawaran atau Produksi Bahan Makanan di Dalam Negeri. Produksi bahan makanan didalam negeri tidak tumbuh secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita. Hal ini menyebabkan harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk naik, sehingga melebihi kenaikan

harga barang-barang lain. Dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya tuntutan karyawan untuk mendapatkan kenaikan upah atau gaji. Naiknya upah karyawan menyebabkan kenaikan ongkos produksi. Hal ini berarti akan menaikkan harga barang-barang. Kenaikan harga barang-barang tersebut mengakibatkan kenaikan upah lagi. Kenaikan upah selanjutnya diikuti oleh kenaikan harga barang-barang, begitu seterusnya.

Proses ini akan berhenti apabila harga bahan makanan tidak mengalami kenaikan. Namun, karena faktor strukturalis harga bahan makanan akan terus naik sehingga proses dorong-mendorong antara upah dengan harga tersebut selalu mendapat umpan baru dan tidak berhenti.

Dari ketiga teori menyatakan penyebab terjadinya inflasi di atas, disebabkan oleh:

- a. Inflasi disebabkan oleh sektor ekspor-impor Jika ekspor suatu negara lebih besar daripada impor, akan mengakibatkan terjadinya tekanan inflasi, tekanan inflasi terjadi karena semakin besar jumlah uang yang beredar di dalam negeri akibat penerimaan devisa.
- b. Inflasi disebabkan oleh sektor penerimaan dan pengeluaran negara Sektor penerimaan dan pengeluaran suatu negara yang defisit menjadi penyebab inflasi. Karena pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya, maka untuk menutupi keadaan tersebut akan dilakukan dengan mengeluarkan uang baru, pengeluaran uang baru menimbulkan tekanan inflasi.
- c. Inflasi disebabkan oleh sektor swasta Pengeluaran kredit dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi permintaan kredit swasta dapat juga menyebabkan terjadinya inflasi.

Jadi jelas penyebab inflasi atau kenaikan harga di atas bahwa pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan naik turunnya harga. Berikut ini akan dipaparkan teori permintaan dan penawaran secara umum dan secara Islami.

a. Teori Permintaan Umum dan Islami

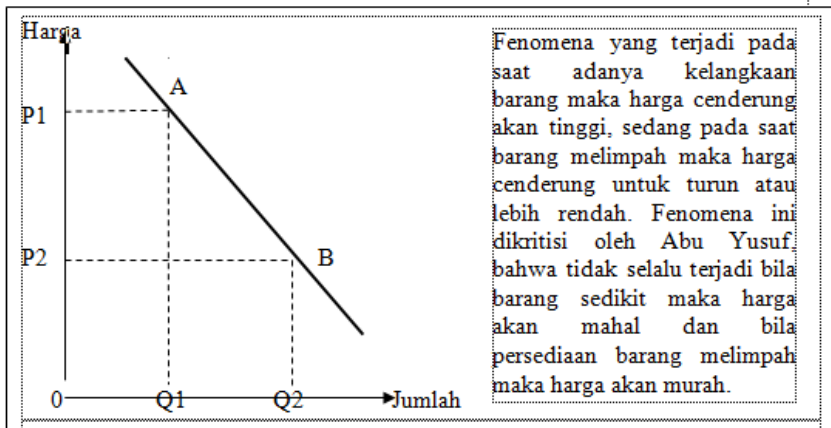
Pada bahasan ini akan diuraikan mengenai teori permintaan umum dan teori permintaan secara Islami, yaitu:

1. Teori Permintaan Umum

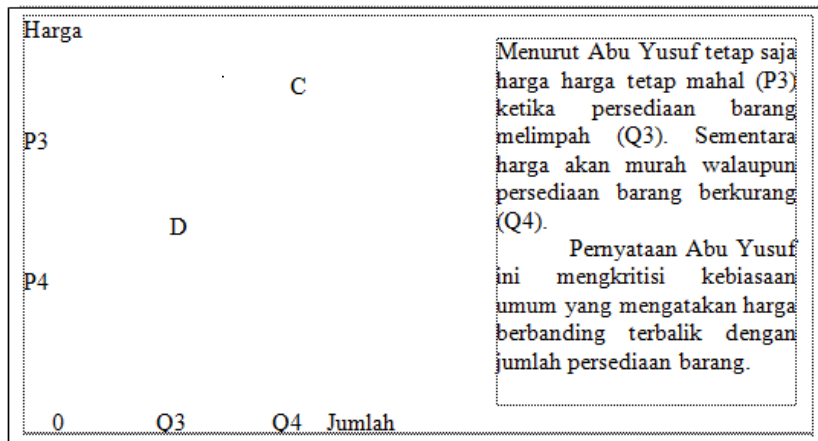
Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Permintaan dapat juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang dan perkhidmatan pada pelbagai tingkat harga dan tingkat masa tertentu. Permintaan, dapat diartikan sebagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Permintaan pasar untuk suatu produk adalah jumlah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu dalam wilayah geografis tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan dalam lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran tertentu.⁸

Menurut Masykur Wiratno permintaan adalah sebuah daftar atau kurva yang menghubungkan berbagai jumlah yang akan dibeli setiap waktu yang ditentukan pada harga-harga alternative “*ceteris paribus*”.

Konsep permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang yang diminta (Q_d) dengan harga (P) berbagai tingkat harga. Hukum permintaan (*law of demand*) menerangkan bahwa dalam keadaan hal lain tetap (*ceteris paribus*) apabila harga naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan berkurang, dan sebaliknya apabila harga turun, maka permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa pada saat harga turun dari P_1 ke P_2 , maka permintaan terhadap suatu barang meningkat dari Q_1 ke Q_2 . Bentuk kurva permintaan diatas arahnya turun, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah (*downward sloping to the right*) yang menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan merupakan hubungan yang terbalik (negatif).⁹ Hal ini dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:¹⁰



Pernyataan Abu Yusuf¹¹ bahwa tidak selalu terjadi bila barang sedikit maka harga akan mahal dan bila persediaan barang melimpah maka harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini:¹²



Teori permintaan, bahwa permintaan akan bertambah apabila harga turun dan akan berkurang apa bila harga naik". Hukum permintaan tersebut dilatari oleh kenyataan bahwa orang harus memenuhi kebutuhannya sebatas anggaran atau pendapatan tertentu. Hukum permintaan menyatakan, bahwa bila harga suatu barang meningkat, maka kuantitas (jumlah) barang yang diminta akan berkurang atau menurun, dengan asumsi *ceteris paribus* (diluar obyek yang diselidiki, keadaannya tetap tidak berubah).

Apabila dinyatakan dalam bentuk tabel, "permintaan" dapat dimisalkan sebagai berikut :

Daftar berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga:

Harga Barang X (Rp)	Kuantitas barang X yang diminta (unit)	Titik Korespondensi
100	10	A
110	8	B
120	6	C
150	1	D

Apabila dinyatakan dalam bentuk matematis dapat ditulis:

$$Q_d = f(H, H_s, H_k, Y, t)$$

dimana :

Q_d = Jumlah barang yang diminta

H = Harga barang yang bersangkutan

H_s = Harga barang substitusi

H_k = Harga barang komplementer

Y = Pendapatan konsumen

t = Selera (*taste*), biasanya faktor ini dihilangkan karena sulit untuk mengukurnya secara kuantitatif.

Rumusan tersebut dapat dibaca sebagai berikut: Jumlah barang tertentu yang diminta tergantung atas tingkat harga barang tersebut, harga barang lain yang bersifat substitusi, tingkat harga barang lain yang bersifat komplementer, pendapatan konsumen dan selera. Keunggulan pendekatan matematis dibanding dengan grafis yaitu tidak diharuskan pernyataan *ceteris paribus*. Hukum permintaan menyatakan apabila harga sesuatu barang meningkat kuantiti yang diminta jatuh, dan apabila harga sesuatu barang jatuh maka kuantiti yang diminta akan meningkat, *ceteris paribus*.¹³

2. Teori Permintaan Islami

Menurut Ibnu Taimiyyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah *raghbah fil al-syai*. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib.

Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat, apabila barang tersebut tidak dimakan akan membahayakan dirinya. Di saat darurat seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang haram seperlunya. Selain itu, dalam ajaran Islam orang yang mempunyai uang banyak tidak serta merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Batasan anggaran (*budget constrain*) belum cukup dalam membatasi konsumsi. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim tidak berlebihan (*israf*), dan harus mengutamakan kebaikan (*maslahah*). Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan dan kemubadziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab, untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak dan shadaqah.

Permintaan terhadap barang halal sama dengan permintaan dalam ekonomi pada umumnya, yaitu berbanding terbalik terhadap harga, apabila harga naik, maka permintaan terhadap barang halal tersebut berkurang, dan sebaliknya, dengan asumsi *ceteris paribus*. Apabila menghadapi pilihan antara barang halal dan haram, maka *optimal solution*nya adalah *corner solution*, yaitu keadaan dimana kepuasan maksimal terjadi di kurva indiferen dengan konsumsi barang haramnya di titik 0. Dengan kata lain, gunakan anggaran untuk mengkonsumsi barang halal seluruhnya. Apabila Y adalah barang haram dan X adalah barang halal, maka *optimal solution* nya adalah pada titik dimana konsumsi barang haram berada di titik 0.

Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M) dalam kitab *Majmu' Fatawa* menjelaskan, bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang antara lain:

- a. Keinginan atau selera masyarakat (*Raghab*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Di mana ketika masyarakat telah memiliki selera terhadap suatu barang maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut.
- b. Jumlah para peminat (*Tullab*) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Dalam hal ini dapat disamakan

- dengan jumlah penduduk, di mana semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah para peminat terhadap suatu barang.
- c. Kualitas pembeli (*Al-Mu'awid*). Di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan masyarakat, maka kualitas masyarakat untuk membeli suatu barang akan naik.
 - d. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut tinggi.
 - e. Cara pembayaran yang dilakukan, tunai atau angsuran. Apabila pembayaran dilakukan dengan tunai, maka permintaan tinggi.
 - f. Besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan meningkat.

3. Perbedaan Teori Permintaan Umum dengan Permintaan Islami

Definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan, antara permintaan umum dan Islam mempunyai kesamaan. Ini dikarenakan bahwa keduanya merupakan hasil dari penelitian kenyataan dilapangan (empiris) dari tiap-tiap unit ekonomi. Namun terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya, diantaranya:

- a. Perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah SWT. Permintaan Islam secara jelas mengakui bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari pengalaman berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, tapi juga berasal dari firman-firman Tuhan (*revelation*), yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi oleh variabel keyakinan religi dalam mekanisme sistemnya. Sementara itu dalam ekonomi umum filosofi dasarnya terfokus pada tujuan keuntungan dan materialisme. Hal ini wajar saja karena sumber inspirasi ekonomi umum adalah akal manusia yang tergambar pada

daya kreatifitas, daya olah informasi dan imajinasi manusia. Padahal akal manusia merupakan ciptaan Tuhan, dan memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan kemampuan.

- b. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal maupun yang haram. Allah telah berfirman dalam Surat Al-Maidah [5] ayat 87-88:¹⁴

Oleh karenanya dalam teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan umum, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan.

- c. Motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut sedangkan motif permintaan umum/konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan (*interest*). Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia.
- d. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat (*falah*) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian yaitu kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

Perbedaan yang menjadi asumsi dasar konsep permintaan umum maupun Islami memiliki keterkaitan langsung terhadap implementasi konsep permintaan tersebut. Perbedaan yang perlu diperhatikan terutama pada permintaan dalam Islam adalah sumber hukum dan adanya batasan syariah, sudut pandang barangnya, motif dari permintaan dan tujuannya. Dengan asumsi bahwa tidak ada hubungan keterkaitan antara permintaan dalam ekonomi konvensional dengan permintaan dalam ekonomi Islam, maka harus memilih salah satu dari keduanya. Oleh karenanya diharapkan bahwa permintaan dalam ekonomi Islam ini benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehingga tercipta perekonomian masyarakat yang Islami.¹⁵

b. Teori Penawaran Umum dan Islami

Pada bahasan ini akan diuraikan mengenai teori penawaran umum dan teori penawaran secara Islami, yaitu:

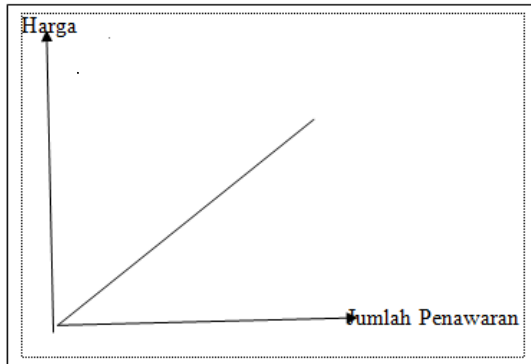
1. Teori Penawaran Umum

Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan situasi. Penawaran dapat juga diartikan sebagai kemampuan produsen dalam menyediakan permintaan masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Keinginan para penjual dalam menawarkan barang ada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu: (1). Harga barang itu sendiri. (2). Harga-harga barang lain. (3). Biaya produksi. (4). Tujuan perusahaan. (5). Tingkat produksi yang digunakan. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu.

Perbedaan definisi penawaran dengan definisi permintaan hanya terletak pada satu kata. Jika pada permintaan menggunakan kata membeli, maka penawaran menggunakan kata menjual. Seperti juga dalam permintaan, analisis penawaran juga mengasumsikan suatu periode waktu tertentu, dan bahwa faktor-faktor penentu penawaran selain harga barang tersebut dianggap tidak berubah atau konstan (*ceteris paribus*).¹⁶ Dijelaskan bahwa penawaran berkorelasi positif terhadap harga (P). Ini berarti bahwa semakin tinggi suatu harga produk, semakin memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksinya dan kemudian menawarkannya kepada konsumen yang membutuhkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga produk, semakin berkurang insentif bagi produsen untuk memproduksi dan menawarkannya. Hal ini disebabkan karena makin rendah suatu harga, makin kecil suatu keuntungan atau malah timbul kerugian. Sebagai suatu agen ekonomi yang rasional, produsen akan memutuskan produksinya. Dengan demikian dapatlah digambarkan dalam sebuah diagram di mana sumbu *vertikal* adalah harga dan sumbu *horizontal* adalah jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat bahwa kurva penawaran sebagai kurva yang naik ke kanan. Kedudukan kurva ini bisa berpindah atau bergeser bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

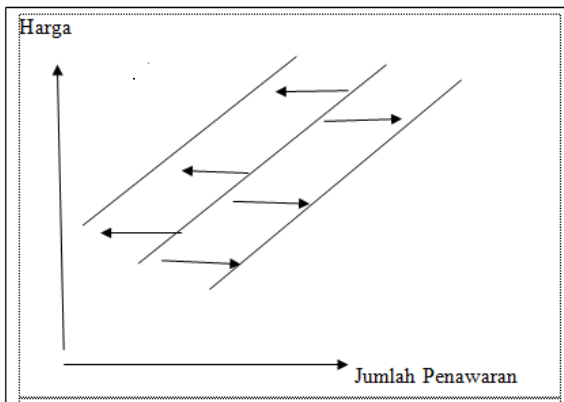
Kemajuan teknologi berperan sangat penting dalam mengurangi ongkos produksi karena perubahan dalam teknologi yang lebih maju memungkinkan dipakainya cara-cara produksi yang jauh lebih efisien dan tentu saja lebih murah dari pada sebelumnya.¹⁷

Secara grafis, hukum penawaran dinyatakan dalam grafik yang naik dari bawah ke kanan atas, seperti terlihat di bawah ini:



Kurva di atas sebuah diagram di mana sumbu *vertikal* adalah harga dan sumbu *horizontal* adalah jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat bahwa kurva penawaran sebagai kurva yang naik ke kanan. Kedudukan kurva ini bisa berpindah atau bergeser bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Perubahan pada variabel-variabel lain di luar harga barang/jasa akan mengakibatkan perubahan penawaran barang/jasa tersebut. Hal ini tercermin dalam grafik sebagai pergeseran kurva penawaran baik ke atas maupun ke bawah.



Grafik di atas adalah pergeseran kurva penawaran. Seperti juga permintaan penawaran suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut. Banyak faktor faktor lain yang mempengaruhi penawaran suatu barang selain harga barang tersebut. Sebagaimana telah diterangkan di atas, perubahan pada faktor faktor selain harga yang akan diuraikan di bawah ini, akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Adapun arah pergeseran apakah ke atas atau ke bawah tentu bergantung kepada efek perubahan masing masing variabel terhadap jumlah penawaran pada tingkat harga yang tetap.¹⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, diantaranya:

1. Biaya produksi

Harga bahan baku yang mahal akan mengakibatkan tingginya biaya produksi dan menyebabkan produsen menawarkan barang dalam jumlah terbatas untuk menghindari kerugian karena takut tidak laku.

2. Teknologi

Adanya kemajuan teknologi akan menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan produsen dapat menawarkan barang dalam jumlah yang lebih besar lagi.

3. Harga barang pelengkap dan pengganti

Apabila harga barang pengganti mengalami kenaikan maka produsen akan memproduksi lebih banyak lagi karena berasumsi konsumen akan beralih ke barang pengganti karena harganya lebih murah.

4. Pajak

Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga barang dan jasa yang akan membawa dampak pada rendahnya permintaan konsumen dan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan.

5. Perkiraan harga barang di masa datang

Apabila kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi berkurang dan tingkat harga barang dan jasa naik, maka produsen akan menambah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Tetapi bila pendapatan masyarakat tetap, biaya produksi mengalami peningkatan, harga barang dan jasa naik, maka produsen cenderung mengurangi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau beralih pada usaha lain.

6. Tujuan dari perusahaan

Bila perusahaan berorientasi untuk dapat menguasai pasar, maka dia harus mampu menekan harga terhadap barang dan jasa yang ditawarkan sehingga keuntungan yang diperoleh kecil. Bila orientasinya pada keuntungan maksimal maka perusahaan menetapkan harga yang tinggi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya.¹⁹

2. Teori Penawaran Islami

Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islami sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakekatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam. *Pertama* adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi (*zuhud*) dan ekonomis (*iqtishad*). Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi trend gaya hidup *Islamic man*. *Kedua* adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini.

C. Kebijakan Pemerintah dalam kenaikan harga

Pada prinsipnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional dalam pembangunan materil dan spirituil demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Kebijakan secara umum meliputi pemerintah, masyarakat dan umum yang disebut kebijakan publik.

Sebagai sebuah sistem yang terdiri dari sub-sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif : dari proses kebijakan dan dari struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan, ada beberapa tahapan diantaranya: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi

kebijakan. Sementara jika dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Seperti penjelasan sebelumnya, suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria yaitu; diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, jelas, dan berorientasi kedepan. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Dengan kata lain, jika suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab : *Pertama*, karena terbaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. *Kedua*, karena munculnya kebutuhan baru setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan. Unsur *ketiga*, Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Seberapa besar dampak yang terjadi untuk tiap jenis kebijakan sulit diperhitungkan karena : tidak tersedianya informasi yang cukup, dalam bidang sosial pengaruh dari satu kebijakan sulit dipisahkan dari pengaruh kebijakan lain, proses berjalannya pengaruh dari sesuatu kebijakan di bidang sosial sulit untuk diamati. Unsur *keempat*, sarana atau alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain : kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.²⁰

Menurut Retno Wd kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga menggunakan 3 kebijakan yaitu:²¹

1. Kebijakan moneter
 2. Kebijakan fiskal
 3. Kebijakan non moneter
1. *Kebijakan Moneter*

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka dan menaikkan cash ratio.

- 1) Politik Diskonto ditujukan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
- 2) Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.
- 3) Cash Ratio artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah (penerimaan dan pengeluaran pemerintah). Bentuk kebijakan ini antara lain:

- 1) Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
- 2) Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan

barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

3. Kebijakan Non Moneter

Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang. Yaitu:

- 1) Menaikan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
- 2) Kebijakan upah, tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
- 3) Pengawasan harga dan distribusi barang dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

Menurut Ari Sucipta, cara pemerintah mengatasi inflasi, yaitu dengan cara melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut bidang moneter, fiskal dan kebijakan lain. Adapun penjelasan kebijakan tersebut akan diuraikan di bawah ini.²²

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu:

a. Persediaan Kas

Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

b. Operasi Pasar Terbuka

Menurut Djamil Suyuthi (dalam Pengantar Ekonoi Makro:1989) dinyatakan bahwa bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan jalan membeli atau menjual surat-surat berharga pemerintah (*government securities*). Dalam bukunya dinyatakan bahwa bila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, misalnya karena bermaksud untuk mendorong perkembangan kegiatan dalam masa resesi, maka bank sentral mengadakan pembelian-pembelian surat berharga.

Dengan tindakan ini, uang beredar akan bertambah, karena bila bank sentral melakukan pembayaran atas pembelian itu, cadangan bank-bank umum akan bertambah. Dengan bertambahnya cadangan yang dimiliki bank umum, maka bank-bank tersebut dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Sebaliknya, bila pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, misalnya pada waktu inflasi, maka bank sentral harus melakukan penjualan surat-surat berharga tersebut. Dengan penjualan surat-surat berharga tersebut, tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dimiliki bank umum berkurang, dan demikian kemampuan untuk memberi pinjaman juga berkurang.

c. Diskonto

Melalui perubahan tingkat diskonto, Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dan volume pinjaman. Misalnya dalam menekan inflasi, kebijakan diskonto dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:

a. Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.

b. Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

3. Kebijakan Lain

Kebijakan lain adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumlah uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi.

a. Sanering

Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:

· Penurunan nilai uang

· Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.

b. Devaluasi

Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.

c. Menaikan hasil produksi.

Cara ini cukup efektif mengingatk inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.

d. Kebijakan upah

Upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya

akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

e. Pengawasan harga dan distribusi barang.

Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

Kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah baru baru ini dalam menanggulangi kenaikan harga seperti; program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dalam bentuk program kompensasi (compensatory program) yang sifatnya khusus (crash program) atau program jaring pengaman sosial (social safety net Program). Program tersebut melalui penambahan nilai bantuan dan coverage program rutin yang sudah ada atau yang dikenal saat ini sebagai Percepatan dan Perluasan Program Perlindungan Sosial (P4S), antara lain: Bantuan Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Harapan dengan adanya program BLSM ini, maka Rumah Tangga Sasaran diharapkan masih konsisten untuk melakukan fungsi sosialnya sehingga kondisi kenaikan kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga tidak menjadikannya berpengaruh signifikan dan tetap masyarakat dapat hidup sejahtera.

BLSM diluncurkan oleh pemerintah mulai 22 Juni 2013 dan diberikan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan besaran Rp150.000,- per bulan selama empat bulan. Tahap awal BLSM diberikan dua bulan sekaligus, yaitu Rp 300.000,- di mana akan dibagikan bertahap sampai Juli. Pembagiannya fokus pada dua tempat, yaitu PT. Pos Indonesia yang telah ditunjuk dan komunitas masyarakat melalui perangkat pemerintahan. Penyaluran ini didahului dengan mencetak Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai bukti pengambilan dana BLSM dan didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia. Untuk mendanai BLSM tersebut, alokasi anggarannya mencapai Rp 9,3

triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013.²³

Tujuan Pemerintah meluncurkan program BLSM ini, antara lain: 1). Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 2). Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. 3). Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.²⁴

E. Kesimpulan

Pembahasan di atas dapat disimpulkan mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kenaikan harga adalah: 1). *Kebijakan Moneter*. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka dan menaikkan cash ratio. 2). *Kebijakan Fiskal*. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah (penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 3). *Kebijakan Non Moneter*. Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang. Termasuk program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dalam bentuk program kompensasi (compensatory program) yang sifatnya khusus (crash program) atau program jaring pengaman sosial (social safety net Program). Program tersebut melalui penambahan nilai bantuan dan coverage program rutin yang sudah ada atau yang dikenal saat ini sebagai Percepatan dan Perluasan Program Perlindungan Sosial (P4S), antara lain: Bantuan Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Harapan dengan adanya program BLSM ini, maka Rumah Tangga Sasaran diharapkan masih konsisten untuk melakukan fungsi sosialnya sehingga kondisi kenaikan kebutuhan pokok sebagai dampak kenaikan harga tidak menjadikannya

berpengaruh signifikan dan tetap masyarakat dapat hidup sejahtera.

Catatan akhir:

¹. Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 37).

². William Eachern, A. Mc. *Ekonomi Makro: Pendekatan Temporer*, Terjemahan (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 133. Lihat Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi. Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 27.

³. Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2000, h. 10.

⁴. Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi. Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 11.

⁵. Muana Nanga, *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Kedua, 2005), h.247.

⁶. Muana Nanga, *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Edisi Kedua, 2005), h.245.

⁷. Dikutip dari Ari Sucipta, " Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasi Inflasi, *Artikel*, Tahun 2013, h. 1

⁸ Philip kolter, *Manajemen pemasaran di Indonesia*, terjemahan AB susanto, (Jakarta: salemba empat, 2000), 325.

⁹Umar Faruq, "Teori Permintaan Dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional" *Artikel*, Pascasarjana UIN "Sunan Gunung Djati" Bandung.

¹⁰Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004), 28.

¹¹Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Baerut: Dar al-Ma'arif, 1979), yang dikutip dari Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004), 28.

¹²Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004), 29.

¹³ Anynomous, "Hukum Permintaan dan Penawaran" *Artikel*. <http://www.psb-psma.org/content/powerpoint/hukum-permintaan-dan-penawaran>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012.

¹⁴Al-Qur'ān (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974), 111.

¹⁵Umar Faruq, "Teori Permintaan Dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional" *Artikel*, Pascasarjana UIN "Sunan Gunung Djati" Bandung.

¹⁶Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 90.

¹⁷Anonymous, "Teori Penawaran Islami" Artikel, http://dime12002.multiply.com/journal/item/12/Teori_Penawaran_islami. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

¹⁸Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, cet. ke 3, 2010), 90-91.

¹⁹Anonymous, "Hukum Permintaan dan Penawaran dalam Ilmu Ekonomi" Artikel, <http://dhewiiwyyy.blogspot.com/2011/04/hukum-permintaan-penawaran-dalam-ilmu.html>. Diakses tanggal, 21 Juni 2012.

²⁰. Hans, "Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan BBM, *Maklah*, Tahun 2013

²¹. Retno Wd., "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi", *Artikel*, Tahun 2012

²². Dikutip dari Ari Sucipta, "Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasi Inflasi, *Artikel*, Tahun 2013, h. 1

²³ Iwan Hermawan, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. V, No. 13/1P3DI/Juli/2013.

²⁴ Anonymous, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Artikel*, Biro Humas Setda Prov. Sumbar, 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Alal Mazdahibil Arba'ah*, Daar El-Fikr Beirut, th. 1994

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Penerbit Megistra Insania Press, Cet. I. th. 2004)

Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* (Baerut: Dar al-Ma'arif, 1979)

Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

-----, *Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Al-Qur'an (Jakarta: PT Tegalyoso Utama, 1974)

Amri Arrusdiprogram, "Blsm yang Menuai Pro Kontrauniversitas", *Makalah*, Jenderal Soedirman, Tahun 2014

Amri arrusdi, "Universitas Jenderal Soedirman" *Artikel*, Fakultas biologi Tahun 2014

Anonymous, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Artikel*, Biro Humas Setda Prov. Sumbar, 2013.

-----, "Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), *Draft Buku Putih Sanitasi Kota Serang*, Pokja PPSP Kota Serang 2011

-----, *Kota Serang dalam Angka* (Kota Serang: Penerbit, Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2014)

-----, "Hukum Permintaan dan Penawaran" *Artikel*.
<http://www.psb-psma.org/content/powerpoint/hukum-permintaan-dan-penawaran>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2012.

Ari Sucipta, " Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasi Inflasi, *Artikel*, Tahun 2013 Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2000

Aprian Jaelani, " Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga BBM" *Artikel*, Tahun 2014

Biro Pusat Statistik tahun 2012

Dalil Hasan, *Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Bineka Rena Pariwara, No. 6/VII/ 1996

-
- Eko Riyanto dan Solikhin, "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Menggunakan Metode Profile Matching Berbasis Web", *Artikel*, STMIK HimSYA, 2013
- Giddens, Antony, *Studies and Social and Political Theori*, (London: Hutchinson & Co Publisher Ltd, 1997)
- Gunawan Sumodiningrat, Budi Santoso, Mohammad Maiwan, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta: IMPAC, 1998
- Hafizah, Yulia, *Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam*, *Jurnal Millah* Vol. IV, No. 2 Januari 2005.
- Hasan, Dalil, *Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: PT. Bineka Rena Pariwara, No. 6/VII/ 1996
- Harian Republika "Pendapat Penyaluran Dana BLSM" 24 Juni 2013.
- Hans, "Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan BBM", *Maklah*, Tahun 2013
- Iwan Hermawan, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. V, No. 13/IP3DI/Juli/2013.
- Iklima Nur Annisa, " Pengaruh Tingkat Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Kasemen Kota Serang Terhadap lingkungan Setempat" *Makalah*, 2013
- Ismail, "Sejarah Kenaikan Harga BBM Setiap Kepala Negara Republik Indonesia", *Atikel*, 2014.

-
- Iwan Hermawan, "Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. V, No. 13/I/P3DI/Juli/2013.
- Jawad Mugniyah, Muhammad, *al-Fiqh ala 'al-Madzahib al-Khomsah*, Daar El-Fikr Berut, th, 1996
- Kementerian PPN/BAPPENAS "Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM dan Program Kompensasinya" Artikel, Menkokesra, Jakarta, 2013.
- Khairil Anwar, "Pengertian Kemiskinan", *Makalah* , IAIN Medan 2013
- Moeljarto Tjokrowinoto, *Pengembangan Kawasan dan Pengentasan Kemiskinan* dalam buku *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991
- Mubyarto dan Baswir, Revrisond, *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1989.
- Muana Nanga, *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan* (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada. Edisi Kedua, 2005)
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grouf, cet. ke 3, 2010)
- M. Deden Ridwan, Ed, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001)
- Nas Suhey, "Analisis Kebijakan Program Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM)" *Artikel*, 2013
- Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Philip Kolter, *Manajemen pemasaran di Indonesia*, terjemahan AB Susanto, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)

Retno Wd., "Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi", *Artikel*, Tahun 2012

Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi. Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Salim, Agus, (Pey). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)

Seri Kajian Fiskal dan Moneter No. 6/VII/96 "Strategi dan Evaluasi Mengentaskan Kemiskinan" *Artikel*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata Cetakan ke 2, 1996

Sumodiningrat, Gunawan, Budi Santoso, Mohammad Maiwan, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta: IMPAC, 1998

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota Serang tahun 2011

Sumodiningrat, Gunawan, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata Cetakan ke 2, 1996

Satyagraha, Editor; Ruslan Burhani "BLSM dinilai sangat membantu masyarakat kurang mampu", *Artikel*, Tahun 2013.

Sri Mulyani, *Dialog Tentang Kemiskinan Pasca Kenaikan BBM*, Selasa tgl. 8 Maret 2005

Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak, *Solusi Masalah Kepesertaan dan Pemutakhiran Data Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)*, (Jakarta: Sekretariat TNP2K, 2013)

Sumber PT. Pos Indonesia cabang Serang Tahun 2013.

Umar Faruq, "Teori Permintaan Dalam Pandangan Ekonomi Islam dan Konvensional" *Artikel*, Pascasarjana UIN "Sunan Gunung Djati" Bandung.

Wiratha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006)

William Eachern, A. Mc. *Ekonomi Makro: Pendekatan Temporer*, Terjemahan (Jakarta: Salemba Empat, 2000)

Wisnu Sukma Darmawan, Kenaikan Harga Kebutuhan Bahan Baku Pangan" *Makalah*, Universitas Gunadarma 2012

Yulaswati, Vivi, dkk., *Panduan Penggunaan Sistem Informasi Manajmen Terpadu PNPM Mandiri* (Jakarta:2009).